



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK-17.KP.03.03 Tahun 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas, perlu melakukan pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.H.H-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-07.KP.05.02 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

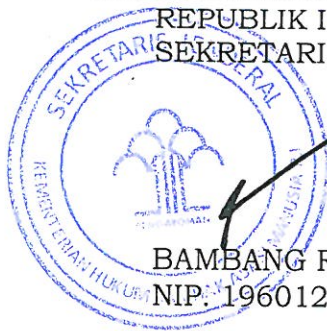
MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 MARET 2019

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Direktur Jenderal Imigrasi;
7. Direktur Jenderal Pemasarakatan;
8. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

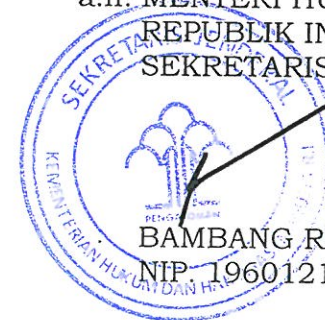
NOMOR : SEK-17.KP.03.03 Tahun 2019

TANGGAL : 4 Maret 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	IWAN KURNIAWAN, S.H. NIP. 197904262006041001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Program dan Pelaporan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	Kepala Bidang Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	Eselon III.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.1.260.000,00
2.	YULIUS MANURUNG, S.H., M.H. NIP. 197606082002121002	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua	Kepala Bidang Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua	sda.
3.	SUGIHARTO NASRUN, S.Kom. NIP. 197803052009121003	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pengembangan Perangkat Keras pada Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Anggota Teknis Hukum pada Balai Harta Peninggalan Makassar	Eselon III.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.980.000,00
4.	MUHAMMAD ILHAM, S.H. NIP. 198106132001121001	Penata Tk. I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua	Eselon IV.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.540.000,00
5.	RUDI FAHLIANI, S.H. NIP. 198309112001121002	Penata (III/c)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah	sda.
6.	LIYANA, S.Ag., M.Si. NIP. 197310031994032001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbagian Penyusunan Pelaporan, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah	Kepala Subbagian Program dan Pelaporan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah	sda.

1	2	3	4	5	6
7.	PIRHANSYAH, S.E. NIP. 198001092006041001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah	Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah	Eselon IV.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.540.000,00
8.	PRATIWI RAHAYU, S.E. NIP. 198806122010122002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	Kepala Subbagian Program dan Pelaporan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	sda.
9.	ABD. HARIS M., S.H., M.H. NIP. 197110051993031001	Pembina (IV/a)	Kepala Subseksi Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau	sda.
10.	EDI SUKRIAWAN, S.H. NIP. 198002222000031001	Penata (III/c)	Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar	Eselon IV.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.490.000,00
11.	DAHLAN, S.Sos. NIP. 196412311985031007	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subseksi Perawatan Narapidana/Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu	sda.
12.	ALI PURNOMO, S.H. NIP. 198310172003121002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Urusan Umum pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	sda.
13.	LYDIAH HARUN, S.E. NIP. 197801302005012001	Penata (III/c)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo	sda.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001